



**KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK
BENCANA ALAM (GEMPA BUMI) DI KABUPATEN NABIRE
PROVINSI PAPUA TENGAH**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

FERRA MARRIA A. MANUPUTTY
NIM. 2020021014391

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada tanggal, 03 Juli 2024

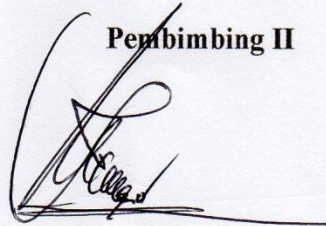
Oleh :

Pembimbing I



Victor Th. Manengkey, S.H., M.H.
NIP. 19590618 198902 1 001

Pembimbing II



Johan Rongalaha, S.H., M.Hum.
NIP. 19600828 199003 1 003

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal, 03 Juli 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Victor Th. Manengkey, S.H., M.H.
NIP. 19590618 198902 1 001

Sekretaris : Johan Rongalaha, S.H., M.Hum.
NIP. 19600828 199003 1 003

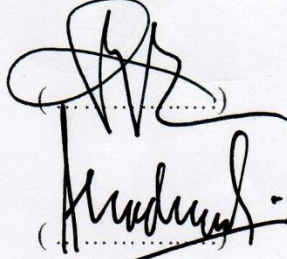
Anggota : Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum.
NIP. 19600127 198902 1 001

Anggota : Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A
NIP. 19591207 198803 1 001

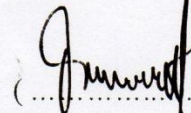
Anggota : Dahlia Ketaren, S.H., M.H
NIP. 19780527 200112 2 003



(.....)



(.....)



(.....)

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Bencana Alam (Gempa Bumi) Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab dan wewenang pemerintah terhadap penanggulangan bencana alam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 dan penyediaan dan pengalokasian anggaran dana bencana alam yang dilakukan oleh pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan tipe penulisan yuridis Normatif. Penelitian jenis ini diterapkan karena berlandaskan pada konsep norma yang mana sumber bahan hukum meliputi pada bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, dan bahan hukum sekunder seperti asas-asas, doktrin hukum serta yurisprudensi yang sudah ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap penanggulangan bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, serta pengalokasian dana penanggulangan bencana alam melalui tahap pelaksanaan penanggulangan bencana alam yang berupa tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Dan dititik beratkan pada tahap kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Mengingat bahwa tindakan preventif (mencegah) lebih baik daripada kuratif (pengobatan atau penanganan). Bencana alam itu sendiri memang tidak dapat dicegah, namun dampak buruk akibat bencana dapat kita cegah dengan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Oleh sebab itu, untuk mengurangi korban saat bencana alam terjadi pemerintah dan pemerintah daerah serta badan yang bergerak dalam proses penanggulangan bencana alam harus memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan dan darurat bencana alam. Sehingga jika mulai ada tanda bencana alam yang akan terjadi masyarakat sudah mengetahui langkah apa yang harus diperbuat..

Kata Kunci : Tanggung Jawab Pemerintah, Masyarakat Terdampak Bencana Alam (Gempa Bumi).

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : “janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”.

(Yesaya 41:10)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Orang tua terkasih Bapak dan Ibu.
2. Sadara Ku tersayang
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran tuhan yang maha pengasih dan penyayang atas penyertaanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Bencana Alam (Gempa Bumi) Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan yakin bahwa skripsi yang sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc., Agr. Selaku rektor Universitas Cendrawasih Jayapura
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H selaku Ketua Bagaian Hukum Perdata yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Victor Th. Manengkey, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Johan Rongalaha, S.H., M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk bimbingan penulis dalam penyusunan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah bekal penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Segenap Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan sabar telah memberikan ilmunya yang telah membekali penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan Skripsi ini.
8. Segenap staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan tulus dan sabar memberikan layanan administrasi akademik kepada penulis.
9. Tim Penguji yang sangat pro aktif dalam memberikan koreksi dan nilai positif terhadap materi penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, namun telah memberikan sumbangan pikiran dan dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat dirampungkan.

Semoga bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, segenap pihak dan keluarga serta handai taulan, mendapat balasan dari Allah bapa di surga. Terakhir penulis menyadari akan ketidaksempurnaan skripsi yang sederhana ini, hal mana disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya yang dimiliki, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat dihargai.

Jayapura, 03 Juli 2024

FERRA M. A. MANUPUTTY
NIM. 2020021014391

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Tanggung Jawab Hukum	10
B. Pengertian Bencana	15
C. Mitigasi.....	19
D. Penanggulangan Bencana.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Dan Wewenang Pemerintah Terhadap Penanggulangan Bencana Alam Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007	22
B. Penyediaan Dan Pengalokasian Anggaran Dana Bencana Alam Yang Dilakukan Oleh Pemerintah	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA